



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI  
PANJA KOMISI II DPR RI DENGAN PJ GUBERNUR PAPUA BARAT,  
DPR PAPUA BARAT, MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT,  
BUPATI MANOKWARI, BUPATI FAK FAK, PIMPINAN DPR KABUPATEN  
MANOKWARI, DAN PJ BUPATI TAMBRAUW**

---

<b>Tahun Sidang</b>	:	2022-2023
<b>Masa Persidangan</b>	:	I
<b>Rapat ke-</b>	:	--
<b>Jenis Rapat</b>	:	Rapat Dengar Pendapat/Audiensi Panja
<b>Sifat Rapat</b>	:	Terbuka
<b>Hari &amp; Tanggal Rapat</b>	:	Senin, 5 September 2022
<b>Waktu Rapat</b>	:	14.55 s.d. 16.24 WIB
<b>Tempat Rapat</b>	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
<b>Ketua Rapat</b>	:	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
<b>Acara Rapat</b>	:	Audiensi Penyampaian Aspirasi Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
<b>Sekretaris Rapat</b>	:	Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
<b>Hadir</b>	:	23 dari 25 orang Anggota dengan rincian: <b>A. Anggota DPR RI:</b> <b>PIMPINAN:</b> 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-Golkar) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB) 4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**  
**5 orang Anggota dari 5 Anggota:**
  1. Arif Wibowo
  2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
  3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
  4. M.R. Ihsan Yunus, B.A, B.Comm., ME.Con.
  5. Ir. Hugua
  
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR:**  
**3 orang Anggota dari 3 Anggota:**
  1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
  2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
  3. Drs. H. Riswan Tony DK
  
3. **FRAKSI PARTAI GERINDRA:**  
**3 orang Anggota dari 3 Anggota:**
  1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
  2. Drs. Difriadi
  3. Drs. Supriyanto
  
4. **FRAKSI NASDEM:**  
**2 orang Anggota dari 2 Anggota:**
  1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  2. Rico Sia, B.E., S.E., M.Si.
  
5. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**1 orang Anggota dari 1 Anggota:**
  1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
  
6. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**  
**2 orang Anggota dari 2 Anggota:**
  1. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
  2. Anwar Hafid
  
7. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**  
**2 orang Anggota dari 2 Anggota:**
  1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
  2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
  
8. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**  
**1 orang Anggota dari 1 Anggota:**
  1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
  
9. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**  
**0 orang Anggota dari 1 Anggota:**  
-

**B. LEMBAGA NEGARA:**

1. Ketua DPD 1 RI (Filep Wamafma, S.H.,M.Hum.)
2. PJ. Gubernur Papua Barat (Komjen Polisi (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si.);
3. DPR Papua Barat;
4. Majelis Rakyat Papua Barat;
5. Bupati Manokwari (Hermus Indou, PMH);
6. Bupati Fak Fak;
7. Pimpinan DPR Kab. Manokwari; dan
8. PJ. Bupati Tambrauw (Engelbertus G.Kocu,S.Hut,M.M.)
9. Ketua Pemekaran Prov Papua Barat (Drs.E.C.Lambertus Jitmau,M.M.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Sudah cukup, biar kita mulai, ini dari Bappenas mana? Tadi minta dikasih tempat tetapi *enggak* datang, mana.

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Irjen Polpum Kemendagri,  
Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPD RI Pak Filep, kemudian  
Pak Deputi Kementerian PPN, kemudian  
Yang terhormat Saudara Pejabat Gubernur Papua Barat dan Seluruh jajaran,  
Kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat,  
kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD Papua Barat, kemudian  
Yang terhormat Saudara Bupati Manokwari, kemudian  
Yang terhormat Saudara Bupati Tambrau, Pj ya, Pj Bupati Tambrau,  
Kemudian yang terhormat Saudara Bupati Fak Fak kemudian,  
Yang terhormat Saudara Bupati Kaimana, belum hadir ya?  
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR Kabupaten Manokwari kemudian,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR Kabupaten Tambrau,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Panja Komisi II DPR  
RI,

Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih menghadiri rapat Panja dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Terima kasih juga kepada Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, kemudian para raja, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini.

*Nah*, rapat ini adalah rapat tadinya kita mau sebelum pengambilan keputusan karena memang masih ada hal-hal yang kita sinkronkan. Kita sengaja membuat rapat ini dan rapat ini disebut sebagai Rapat Dengar Pendapat Umum atau audiensi dari bapak-bapak yang tadi saya sebutkan.

*Nah* karena ini memang bukan pengambilan keputusan, kami akan menyerap informasi. Rapat ini tidak harus memenuhi kourum, di sini sudah hadir lengkap saya kira mewakili fraksi-fraksi. Dan oleh karena itu saya bisa menyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.55 WIB)**

Selanjutnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. *Nah* seperti tadi yang sudah saya sampaikan kami Komisi II dalam rapat ini ingin mendapatkan aspirasi.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan perkembangan bahwa Komisi II sudah membentuk Panja, Panja Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan sebetulnya ini waktu-waktu di mana akhirnya kita udah menyelesaikan tugas kami di Panja.

Sedianya sore ini kita akan melaporkan Panja ini kepada Rapat Kerja Tingkat I yang dihadiri oleh 4 (empat) menteri yang diutus oleh pemerintah untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I. Tetapi karena memang masih ada isu yang perlu kita sinkronkan maka kemudian kita perlu untuk mendengarkan aspirasi dari Bapak-bapak sekalian ya.

*Nah* setidaknya ada tiga persoalan ya. Yang pertama, jadi kami sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini di Tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, sudah selesai. Tinggal ada tiga substansi ya. Substansi yang pertama adalah mengenai Ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Ada dua aspirasi; yang pertama itu adalah di Kota Sorong yang kedua adalah di Kabupaten Sorong.

Yang kedua adalah soal cakupan wilayah ya, ada usulan, usulan yang pertama adalah cakupan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya ini, itu terdiri dari enam kabupaten/kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan kemudian Kabupaten Maibrat, Tambrauw dan Raja Ampat. Tetapi ada aspirasi yang berikutnya adalah Papua Barat Daya ini ada terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten ditambah dengan Fak Fak dan Kaimana, itu isu yang kedua, substansi yang kedua.

Substansi yang ketiga adalah adanya aspirasi, aspirasi dari 4 (empat) distrik yang sekarang sudah menjadi sebelas distrik di Kabupaten Tambrauw itu untuk kembali ke Kabupaten Manokwari. *Nah* tiga isu ini yang walaupun isu yang terakhir ini saya sudah pernah sampaikan di rapat ini kita juga sudah punya alternatif solusi. Waktu Pak Bupati Manokwari datang juga sudah kami sampaikan, sebetulnya isu ketiga ini tidak ada kaitan langsung dengan pembentukan provinsi baru di Papua Barat Daya.

Tetapi saya ingin menyampaikan Komisi II sebenarnya *concern* terhadap isu itu. Oleh karena itu kami berkomitmen setelah undang-undang ini selesai, itu akan ada pembicaraan khusus dengan pemerintah. Dan kami sudah sampaikan dengan Menteri Dalam Negeri, nanti ada rapat-rapat yang memang memasukkan persoalan itu, nanti kita cari jalan keluarnya bagaimana supaya aspirasi dari 4 (empat) atau yang menjadi 11 (sebelas) distrik itu bisa kita terima. Intinya nanti akan ada kesepakatan antara dua kabupaten, antara Tambrauw dengan Manokwari.

*Nah* itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya, dua isu yang kami ingin dengarkan sebelum kami mengambil keputusan.

Jadi kita sekali lagi semuanya harus punya komitmen, upaya apapun yang kita lakukan sekarang, ini untuk bagaimana mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua ya.

Kita punya pengalaman, kemarin kami di Komisi II sudah punya pengalaman menyusun undang-undang tiga provinsi. *Alhamdulillah* berjalan dengan baik. Kitapun juga menginginkan proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini sama sukses dan baiknya nanti dengan 3 (tiga) provinsi sebelumnya.

Oleh karena itu semuanya kita selesaikan dengan dialog ya, dengan dengar pendapat, dengan kepala dingin ya, untuk mencari solusi. Saya berharap nanti kita semua bisa menyampaikan pandangan-pandangan kita. Dan kita nanti pada akhirnya, kami bersama pemerintah bisa mengambil keputusan yang bisa diterima semua dan ini tujuannya satu kembali kepada untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan di tanah Papua.

Itu saya kira yang harus menjadi komitmen kita bersama. Jadi sifatnya kami Komisi II dengan pemerintah di sini ada yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian PPN dan juga Komite I, ini mendengarkan lebih banyak masukkan aspirasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Oleh karena itu kesempatan yang pertama kami beri kepada pejabat Gubernur Papua Barat, kemudian nanti mungkin Ketua MRP, kemudian Ketua DPR Papua Barat, kemudian Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya. Dan mungkin kalau perlu nanti ditambah dengan yang lain yang ada keterkaitan ya. Pak Bupati mungkin nanti kalau ada kesempatan.

Kami persilakan Pak Gubernur.

**PJ GUBERNUR PAPUA BARAT (PAULUS WATERPAUW):**

Terima kasih, yang pertama.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
*Shalom* untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Name budaya,*  
Salam kebajikan,  
Salam sejahtera,  
Salam jumpa dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian,

Yang saya hormati dan kasihi Bapak Pimpinan,  
Ketua Komisi II Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, terima kasih atas waktunya,

Juga yang saya kasihi, hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Junimart Girsang S.H., M.H, dan juga,  
Bapak Wakil Ketua Bapak Dr.Syamsurizal S.E., M.M. dan seluruh,  
Bapak/Ibu yang kami hormati Anggota Komisi II yang hadir,  
Juga yang saya hormati dan kasihi Bapak Dirjen Polhum yang hadir juga mewakili Bapak Kemendagri,  
Bapak Mendagri juga,  
Pimpinan Komisi I DPD RI, ada  
Juga Deputi Bappenas,  
Juga yang saya kasihi Bapak Ketua DPR Papua Barat, dan  
Yang mulia Bapak Ketua MRP Papua Barat,  
Bapak Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Lambert Jitmau dan,  
Seluruh Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya kasihi,

Pertama-tama saya juga mengaturkan puji syukur dan *Alhamdulillah* Tuhan baik akhirnya kami boleh hadir di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas bersama. Kami dari wilayah boleh diterima oleh Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh Bapak/Ibu Dewan yang kami hormati dan kasihi.

Terima kasih.

Terkait dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa, Bapak Pimpinan tadi bahwa substansi berkaitan dengan Ibukota Provinsi Papua Barat kami laporkan sebagai berikut.

Bahwasannya kami juga dari pemerintah provinsi, Kabupaten Provinsi Papua Barat dalam hal ini menyatakan bahwa, sebagai gubernur dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung, mendukung pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, menjadi daerah baru calon Provinsi Papua Barat Daya, Terima kasih.

Karena pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah digagas dan disiapkan selama kurang lebih 20 tahun oleh para pendahulu yaitu para Bupati dan Walikota juga DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat ada di wilayah yang serang, yang sekarang disebut sebagai wilayah Sorong Raya. Yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Membrad dan Kabupaten Tambrau.

Gagasan ini telah disambut baik dan didukung oleh para Gubernur Papua Barat seperti almarhum Bapak Gubernur Abraham Ataruri maupun Gubernur Domingus Malacang. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami Bapak Pimpinan, bahwasannya bahwa dalam amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus dari Undang-Undang No.21 Tahun 2021 bahwasannya memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru terutama di wilayah provinsi yang ada di wilayah Papua.

Untuk itu sebagaimana yang kami sudah ikuti bahwasannya pemerintah pusat sudah memberikan pemekaran wilayah di wilayah, tiga wilayah DOB di Provinsi Papua yaitu; berdasarkan Undang-Undang No.14 2022 tentang Provinsi Papua Selatan dan juga Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan Tengah, Undang-Undang No. 15 dan juga 16 2022, maka besar harapan kami pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu upaya dalam hal menata daerah dan juga untuk merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali atau *spend of control* pemerintahan hingga dapat lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Oleh karena itu hal yang menjadi pembentuk DOB Provinsi Papua Barat Daya, kami laporkan bahwa provinsi ini memiliki luas wilayah 38.820,49 kilo meter persegi, yang merupakan meliputi enam wilayah administrasi yaitu satu kota dan lima kabupaten yang telah saya sebutkan di depan. Ini perlu ditetapkan ibukota provinsi sebagai pusat pemerintahan dan juga pelayanan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengkajian dan naskah akademik yang kami buat secara cepat atau *rapid assistant*. Bahwasannya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong, itu salah satu yang menjadi catatan kami. Juga memberikan gambaran komperatif bahwa Kabupaten Sorong memiliki faktor sejarah pemerintahan juga tata ruang dan kesesuaian lahan juga konektivitas dan aksesibilitas juga infrastruktur yang sudah siap termasuk fasilitas publik. Maupun juga sumber daya manusia juga sosial budaya, ekonomi dan fiskal daerah, termasuk keadaan politik dan keamanan.

Kami juga menetapkan lokasi paling memungkinkan di Kabupaten Sorong sebagai lokasi perkantoran pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan arahan tata ruang dan juga kesesuaian lahan.

Berdasarkan kajian *rapid assessment* tadi, berbagai aspek menyangkut historis pemerintahan juga kesesuaian tata ruang dan lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk kebencanaan, infrastruktur dan konektivitas wilayah sosial budaya, juga ekonomi, politik, dan keamanan, maka kami mengusulkan, menyimpulkan yang pertama Kabupaten Sorong merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Papua Barat yang merupakan induk dari kabupaten-kabupaten ataupun kota yang ada di wilayah Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya, dipandang layak untuk ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat Daya.

Tentu ini baru usulan dari kami Pak. Nanti ada masukkan dari rekan-rekan, saudara-saudara yang lain. Karena apa? Kabupaten Sorong lebih layak untuk menjadi ibukota dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten atau satu kota, karena memiliki tadi yang kami sebutkan di atas, diantaranya juga kesesuaian rencana pola ruang, dan juga rencana struktur ruang, juga ketersediaan lahan areal penggunaan lainnya yang cukup besar, juga daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup yang belum terlampaui dan juga resiko bencana yang relatif lebih rendah serta ketersediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang relatif baik.

Sehingga berdasarkan kajian cepat yang kami lakukan merekomendasikan Kabupaten Sorong untuk dapat ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

Tentang cakupan wilayah yang tadi Bapak Pimpinan menyampaikan hal substansi. Memang ada wacana yang dimunculkan. Bahwasannya untuk dua wilayah yaitu Fak Fak Kabupaten, karena ada hal jalur sejarah dan budaya yang mereka dimiliki. Kami telah mendapatkan pernyataan dari masyarakat adat Bumrai khususnya Kabupaten Fak Fak.

Untuk Kaimana tadi malam baru diserahkan tetapi masih dalam bentuk amplop yang belum kami dapatkan. Sehingga kami izin menyampaikan bila Bapak Pimpinan menyetujui kami bacakan secara singkat saja, hal yang menjadi pernyataan singkat dari masyarakat Bumrai dari Kabupaten Fak Fak. Diantaranya bahwa masyarakat di Fak Fak menyatakan menginginkan agar segera diproses pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Bumrai Raya yang meliputi Kabupaten Fak Fak, Kaimana atau Ponama dan Teluk Bintuni sebagai salah satu kesatuan dari 7 wilayah adat di tanah Papua yang tidak dapat dipisahkan.

Berkenaan dengan adanya keinginan dan aspirasi penggabungan Kabupaten Fak Fak ke wilayah administrasi DOB Provinsi Papua Barat Daya maka secara prinsip masyarakat Papua wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak dapat memahami dan menerima serta menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat.

Bahwa apabila baik dalam pandangan dan pertimbangan pemerintah pusat untuk menggabungkan Kabupaten Fak Fak ke dalam wilayah administrasi DOB Provinsi Papua Barat Daya maka masyarakat wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fakfak meminta;

Yang pertama pemerintah pusat memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan yang berada di wilayah adat Bumrai dengan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pemahaman bersama.

Kedua, pemerintah pusat dan DPR RI segera memproses pembentukan DOB Kabupaten Kokas dan Kota Fak Fak setelah penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka mempersiapkan pembentukan DOB Provinsi Bumrai Raya ke depan.

Yang ketiga, apabila Kabupaten Fak Fak masuk menjadi bagian dari Provinsi Barat Daya maka diharapkan agar dicapai melalui proses yang elegan dan diperhatikan secara proposional, terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fak Fak yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur dan bidang pengisian aparatur pemerintahan pada tingkat provinsi yang terbentuk.

Ini yang bisa kami bacakan dan ini sudah ditandatangani oleh dua belas, maaf enam belas masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat adat wilayah Bumrai

baik mulai dari Ketua LMA maupun Raja Pategar, Raja Ati-ati, Raja Pikpik Sekar, Raja Rumbati, Raja Wortuar, Raja Rumbati, Raja Patipi, Raja Arguni, tokoh perempuan, tokoh FKOB Fak Fak, tokoh adat, tokoh agama Katholik, tokoh agama Islam, tokoh agama Protestan dan tokoh pemuda.

Demikian mungkin Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan tadi peran Bapak tentang distrik dari Kabupaten Tambrai dan Kabupaten Manokwari ini juga, ini nanti kalau Bapak izinkan nanti akan dipaparkan oleh Bapak Sekda, yang kebetulan sebagai pelaku langsung daripada *check in check out* dari 4 (empat) distrik ini yang waktu itu dalam proses untuk pemekaran Kabupaten Tambrau.

Demikian yang bisa kami sampaikan, kami mohon petunjuk, kami akhiri.

*Wassalamu'alaiku warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom dan,  
Om shanti shanti om,  
Name budaye,  
Salam kebajikan,*

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Pak Gubernur.

Selanjutnya kami persilakan Ketua MRP.

Nanti ada kesempatan khusus untuk Tambrau dan Manokwari satu sesi. Nanti dimulai dari Pak Sekda, baru Bupati Manokwari dan Tambrau.

Kita, kita bicara dulu soal Provinsi Papua Barat Daya, kami persilakan Pak Ketua MRP.

**KETUA MRP PAPUA BARAT:**

*Shalom,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Ketua Komisi II, para wakil,  
Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi II,  
Yang saya hormati Kementerian Dalam Negeri,  
Yang saya hormati Bappenas,  
Yang saya hormati Komite I DPD RI,  
Yang saya hormati Pj Gubernur Provinsi Papua Barat,  
Yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Papua Barat,  
Yang saya hormati Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,  
Yang saya hormati Para Bupati se Papua Barat,

Terima kasih atas suatu kesempatan yang sangat baik ini yang kami bisa dipanggil dan untuk menyampaikan berapa pendapat dan pandangan.

Pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pimpinan Komisi II dan seluruh Anggota, yang mana menyangkut tentang Provinsi Papua Barat Daya ini yang tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur sudah cukup lama sekali, sudah cukup lama sekali dan pada saat pertemuan kami, kami diundang oleh Bapak Presiden pada Bulan April yang lalu. Kami juga sudah menyampaikan secara tegas, mereka diundang di Istana Negara. Dan kami sampaikan, kalau memang Papua dapat tiga, kenapa Papua Barat tidak? Minimal tiga satu lah, minimal tiga satu.

Puji Tuhan pada saat pembicaraan kami sampai dengan hari ini semuanya terkabul dengan baik. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah bahwa apa yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat menyangkut tentang pemekaran Papua Barat Daya ini bisa dapat tercapai.

Pertama, menyangkut tentang letak dan tempat Ibu Kota, kami kira kami dari MRP berpendapat bahwa ini semua kami kembalikan, kami kembalikan kepada Komisi II yang mana dalam dari proses awalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pj. Gubernur bahwa prosesnya sudah cukup lama, sudah 20 tahun dilaksanakan.

Saya kira dalam proses ini pasti sudah ada, pasti sudah ada nama tempatnya sendiri dan letak daripada Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya itu sendiri, Provinsi Papua Barat Daya itu sendiri. Saya kira ini kita kembalikan ke dalam preseden apa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para leluhur kita.

Terus kemudian hal yang kedua, menyangkut tentang ada penambahan dari dua kabupaten/kota yang nantinya akan bergabung dengan Papua Barat Daya. Itupun juga MRP berpendapat bahwa kami kembalikan itu kepada Komisi II.

Menyangkut tentang pandangan dan pendapat daripada berbagai macam masyarakat saya kira kami kembalikan semua ke sana. Dan MRP tetap berpendapat kepada peta wilayah adat, wilayah adat. Jadi kami tetap berpatokkan pada peta wilayah adat yang ada di Provinsi Papua Barat, seperti itu.

Dan juga kami ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi II bahwa seperti apa yang disampaikan Bapak Pj Gubernur untuk pengusulan tentang satu provinsi yang kami tambah lagi yaitu menyangkut tentang Provinsi Bomba Raya. Jadi rakyat Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya lahirnya provinsi ini. Karena dengan lahirnya provinsi ini maka amanat dari Undang-Undang 21 yang hari ini berubah jadi Undang-Undang No 22 itu terpenuhi yaitu menjadi 7 (tujuh) wilayah adat, berarti juga harus ada 7 Provinsi yang harus ada juga.

Oleh karena itu dalam mendukung provinsi yang nantinya lahir maka harus lahirlah beberapa kabupaten/kota yang harus ada di Provinsi Papua Barat. Itupun kami juga sudah menyatakan dalam deklarasi pada beberapa bulan yang lalu hampir seluruh bupati dan walikota, kami sudah menyampaikan ada beberapa kabupaten/kota yang harus dimekarkan.

Saya berharap kepada Komisi II bahwa hari ini orang Papua minta untuk dimekarkan, saya kira ini sudah layak nya orang Papua harus mendapatkan itu.

Saya kira bahwa untuk Provinsi Papua Barat ini sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang mana bahwa usulan dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat khususnya Papua Barat Daya bahwa sudah bisa dapat preseden dengan baik.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Ketua Komisi II dan seluruh Anggota menyangkut tentang 4 (empat) distrik yang tadi sudah disampaikan bahwa itu akan dibicarakan dalam rapat berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Shalom dan,  
Selamat sore untuk kita semua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Saudara Ketua MRP Papua Barat.

Selanjutnya kami persilakan Ketua DPR Papua Barat.

**KETUA DPR PAPUA BARAT:**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Shalom, shalom,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian,  
Yang saya hormati Ketua Komisi II beserta jajaran,  
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri,  
Yang saya hormati Menteri Bappenas,  
Yang saya hormati dan juga Senator kita dari Papua Barat,  
Yang saya hormati Pak Filep Wamafma dan juga Pak Rikusia,  
Yang saya hormati dan juga Ketua Pemekaran Papua Barat Daya,  
Yang saya hormati dan juga para Bupati se-Papua Barat,  
Yang saya hormati dan juga para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi,

Pertama dari DPR ya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Pasal 75 itu memberikan amanat kepada DPR dan MRP untuk memberikan persetujuan kepada daerah yang akan dimekarkan. Artinya dari pemerintah pusat juga diberikan kewenangan tetapi daerah juga dalam hal ini MRP dan DPR diberikan kewenangan untuk bisa memberikan persetujuan.

Oleh sebab itu kita DPR setelah membentuk Panja yang bekerja untuk bagaimana merumuskan berapa persoalan atau beberapa masalah terkait dengan pemekaran Papua Barat Daya dan juga didalamnya mengusulkan untuk pemekaran Bumrai sesuai dengan apa yang tadi Pak Gubernur sampaikan.

Oleh sebab itu sikap DPR seperti ini, kami mendukung sepenuhnya pemekaran Papua Barat Daya yaitu terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maibrat dan Sorong Selatan.

Kami sepenuhnya mendukung juga pemekaran Provinsi Bumrai. Kami DPR siap untuk mendukung dana hibah yang akan diberikan kepada Papua Barat Daya dan apabila Bumrai diusulkan dan mendapat dukungan daripada Komisi II kami pun siap untuk mendukung anggarannya.

Kemudian yang berikut terkait dengan tapal batas yang tadi Bapak Komisi II menyampaikan, ya kami DPR juga pasti akan memantau dan juga mendukung sepenuhnya sehingga tapal batas itu diselesaikan setelah pemekaran Papua Barat Daya itu sudah diketok.

Baik saya minta waktu dari Komisi II untuk nanti ada Ketua Komisi, Ketua Panja kami yaitu Satsaudeida untuk bisa akan menyampaikan dokumen yang sudah kami rumuskan dalam internal rapat DPR yang kami sudah paripurnakan.

Terima kasih, waktu saya kembalikan, terima kasih.

#### **BUPATI KAIMANA:**

Baik, saya langsung Pak Ketua.

Baik terima kasih Pak Ketua.

Sebelum menyerahkan alangkah baiknya saya akan membacakan pernyataan sikap Panja DPR Provinsi Papua Barat yang sudah kami buat sebelum saya serahkan, mohon izin Pimpinan.

Pernyataan sikap Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat terhadap pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya, pada hari ini Kamis tanggal 1 September tahun 2022 Pukul 15.00 bertempat di Hotel Aston New Lantai 4, Ruang Royal 3 Manokwari Papua Barat, dengan ini menyatakan pernyataan sikap.

Satu, bahwa kami Pimpinan dan Anggota DPR Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengajukan pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dan apresiasi ini juga disampaikan kepada Saudara Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah yang mendorong percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Yang kedua, memperhatikan pengantar Bupati Fak Fak No. 045.2/1231/Bup/2022, yang menyatakan bahwa masyarakat adat Mumbrai menolak dan tidak mau bergabung dengan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana surat pengantar Bupati Fak Fak, surat pernyataan masyarakat adat Mumbrai dan surat usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah sebagaimana dokumen terlampir.

Yang ketiga, bahwa kami Pimpinan dan Anggota DPR Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota sebagai daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari; Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat sesuai dengan usulan awal pembentukan pemekaran calon daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya.

Yang kelima, kami mengharapkan DPR RI dan pemerintah pusat agar mempercepat proses terbentuknya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Maibrat, Sau, Kabupaten Malamoi, Kabupaten Imego, Kabupaten Raja Ampat Selatan dan Kabupaten Raja Ampat Utara sebagaimana daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Demikian pernyataan sikap dan mohon izin Pimpinan Sidang, saya akan menyampaikan secara langsung ke meja pimpinan surat pernyataan dokumen pemekaran Provinsi Papua, Provinsi Mumbrai Raya ke Pimpinan Komisi II.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Saudara Ketua Panja.

Selanjutnya kami persilakan Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya.

**KETUA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT (Drs. E.C LAMBERTUS JITMAU, M.M.):**

Ketua dan segenap Anggota Komisi II yang saya hormati dan saya banggakan, beserta,

Anggota Komisi II semua yang berkenan hadir yang saya hormati dan saya banggakan,

Para perwakilan dari Kementerian terkait yang berkenan hadir yang saya hormati dan saya banggakan secara khusus kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat juga,

Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPR Provinsi Papua Barat,

juga yang saya hormati Anggota DPD RI putra terbaik dari tanah Papua yang berkenan hadir,  
Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua MRP Papua Barat yang mulia,  
Para tamu undangan sekalian yang berkenan hadir di tempat ini,  
Semua yang saya hormati dan saya banggakan,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera,  
Selamat sore untuk kita sekalian,

Saya singkat saja tadi Pak Ketua Komisi menyampaikan ada tiga hal. Saya tambah satu lagi menyangkut dokumen. Di tempat ini saya sebagai Ketua Tim Pemekaran Percepatan Provinsi Papua Barat Daya. Kita semua sepakat, jangan kita tengok kembali menyangkut dokumen, dokumen yang sudah dilengkapi sejak 20 tahun yang lalu, menurut kami sangat lengkap dan selengkap-lengkapnyanya dan ini sudah ada di Komisi II dan ada di kementerian-kementerian terkait, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua menyangkut letak Ibukota.

Pak Ketua,

Kita jangan ciptakan lagu baru, tetapi kalau bisa kita ikuti apa yang kita usulkan dari awal sampai hari ini tidak pernah ada perubahan. Provinsi Papua Barat Daya tetap berkedudukan di Kota Sorong, kapan, mau ke mana itu urusan nanti. Negara Indonesia saja pindah ke Kalimantan apalagi dengan Provinsi yang sedikit itu, mari kita tepuk tangan.

Kemudian yang kedua, menyangkut 4 (empat) distrik di Tambrauw yang awalnya ada di Kabupaten Manokwari, sekarang sudah berkembang menjadi 11 (sebelas) bahkan 12 (dua belas) kecamatan kalau nomenkelatur di Pulau Jawa kalau di Papua itu distrik.

Hal ini Pak Bupati Kabupaten Manokwari, Pak Pj. Bupati Tambrauw dan juga putra terbaik Setda Provinsi Papua Barat, kita kalau bisa sepakat saja kita jangan ubah kalau bisa 4 (empat) provinsi atau 11 (sebelas) provinsi apa kabupaten, apa distrik ini ditetapkan masuk di Kabupaten Tambrauw. Dengan suatu catatan 4 (empat) distrik yang berkembang menjadi 11 (sebelas) distrik ini, bupati, pejabat Bupati Tambrauw, Bupati Manokwari dan Pak Setda bahkan kita yang semua keluarga terkait di wilayah itu kita mekarkan, mekarkan wilayah itu, setuju? Kita mekarkan, kita sepakat dan kita serahkan kepada Kabupaten, apa provinsi induk.

Surat pernyataan dibuat oleh Pj. Bupati Tambrauw dan Bupati Manokwari tanda tangan mengetahui, Gubernur Provinsi Papua Barat di tempat ini. Supaya besok kalau terjadi apa-apa, kita tidak perlu berdebat ini dan itu tetapi kita langsung otomatis menyerahkan pada provinsi induk.

Yang terakhir, saya sangat bangga, sangat senang melihat keluarga besar yang ada di Fak Fak dan ada di Kaimana mempunyai suatu niat baik untuk menghadirkan suatu provinsi di wilayahnya, kita harus sambut, kita harus sambut dan sambut.

Ketua Komisi II,

Ini harus, harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak punya tanggungjawab di Senayan. Kemudian kita di daerah tetap bergandengan tangan dan kita mendorong daerah-daerah pemekaran baru.

Yang saya khawatirkan itu begini Pak Ketua Komisi, Fak Fak dan Kaimana bergabung di Kota Sorong, apa di Papua Barat Daya, silakan. Tetapi persoalan yang terjadi adalah jumlah penduduk di Papua Barat sampai hari ini adalah satu juta dua ratus, delapan ratus sudah ada di Sorong Raya tinggal empat ratus, kalau dua ini tambah ke sini tinggal seratus atau dua ratus untuk Provinsi Papua Barat. Aturan tidak memungkinkan bisa di-*merger*, apa kita mau seperti itu, tidak. Fakfak dengan Kaimana tetap tetapi kita semua sepakat untuk mekarkan provinsi yang baru saja diusulkan dan data ada di depan Bapak.

Dan Manokwari Barat ini atau apapun namanya, apa artinya sebuah nama. Tinggal Bupati Tambrau dan Bupati Manokwari didukung dengan putra-putra terbaik di dua daerah itu duduk sama-sama, bicara sama-sama dengan suatu harapan 4 (empat) distrik ini sudah ditetapkan di Kabupaten Tambrau tetapi kita mekarkan, jangan di Tambrau atau di Papua Barat Daya, tetapi dengan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Bupati Manokwari, Bupati Tambrau mengetahui Pj. Gubernur, bila daerah ini dimekarkan kita berikan kepada Kabupaten Manokwari atau Provinsi Papua Barat untuk memperkuat pelayanan di daerah tersebut.

Semua setujukan? Setuju ya tepuk tangan, supaya dengar ditempat ini toh. Hanya itu saja, jadi jangan ada hal lain-lain, kita ini ada budaya, kita ini ada kekeluargaan, kita harus bangun dari dulu kini dan selamanya, sebagai orang Papua di tanah Papua yang Tuhan berikan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih, waktu saya kembalikan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Shalom.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Baik.

Terima kasih Saudara Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya Drs. E.C Lambertus Jitmau, M.M.

Bapak/Ibu sekalian,

Terkait dengan soal proses pembentukan Provinsi Barat Daya, saya kira kita sudah sama-sama mendengarkan tadi dari Pak Gubernur, kemudian

Pak Ketua MRP, Ketua DPRP dan juga sudah ada pernyataan sikap dari DPRP kemudian Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya. Saya kira cukup ya, saya kira ya kalau untuk ini. Nanti ini akan kami, apa namanya? Informasi ini akan kami bahas didalam Rapat Panja.

*Nah* kalau memang sudah cukup kita sekarang bergeser ke soal Tambrauw dan Manokwari untuk itu kami persilakan kepada, sebelum nanti kalau ada tanggapan dari, jadi kita satu-satu.

Silakan Pak Sekda, izin Pak Gubernur ya.

Silakan Bapak Gubernur.

**PJ GUBERNUR PAPUA BARAT (KOMJEN POLISI (PURN.) DRS. PAULUS WATERPAUW, M.SI.):**

Bapak Pimpinan,

Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pimpinan atau yang mewakili dari DPR Papua Barat tentang aspirasi. Maka kami juga dari Jinja mau menyerahkan tentang kajian kami, lewat naskah akademik yang sudah kami buat, mudah-mudahan itu menjadi masukkan yang baik untuk Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan Pak Gubernur.

Terima kasih Pak Gubernur.

Selanjutnya kami persilakan atas izin Pak Gubernur ya, Pak Sekda untuk memberikan penjelasan, silakan Pak Sekda.

**SEKRETARIS DAERAH:**

Terima kasih atas waktu yang disediakan bagi saya.

Pimpinan Rapat Ketua Komisi I,  
Komisi II yang saya hormati dan saya kasihi beserta para Pimpinan rapat pada hari ini,  
Bapak pejabat Gubernur Papua Barat yang saya hormati dan saya kasihi,  
Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri saya hormati dan kasihi,  
Para Anggota DPR Komisi II yang saya hormati dan kasihi,  
Pimpinan Komite I DPD RI,  
Ketua DPR Papua Barat juga,  
Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya dan seluruh hadirin yang saya kasihi dan banggakan,  
Bupati Manokwari dan Pejabat Bupati Tambrauw yang saya hormati dan kasihi,

Saya tidak menyampaikan kronologis dari persoalan 4 (empat) distrik tetapi saya cukup membacakan, menyampaikan harapan kami. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bupati Manokwari dan juga bupati, pejabat Bupati Tambrau sebagai respon terhadap apa yang saya sampaikan dan pelaksanaannya ke depan.

Pimpinan yang saya hormati,

Bahwa kami sangat berharap dan mohon dukungan bahwa pemerintah pusat untuk perlu secara arif dan bijaksana mencermati persoalan yang sudah lama terjadi di daerah kami, serta dengan tegas mengambil sikap politik untuk mengoptimalkan penanganan penyelesaian persoalan. Agar tidak merusak citra adat maupun pemerintah, pemerintah daerah serta mengelola konflik yang telah terjadi menjadi solusi yang melahirkan rekomendasi pembentukan atau pemekaran daerah otonom baru di dataran yang menjadi dataran lembah ke barat Snopy, Amberbaken, Pumburani yang menjadi persoalan sampai hari ini.

Sesungguhnya persoalan yang terjadi hanya antar saudara ber saudara di wilayah Kebar Snopi, Amberwaken, Mumbrani. Tidak terjadi dengan saudara-saudara kami di Kabupaten Tambrau yaitu; Suku Abu maupun Suku Niah orang asli di batas itu. Yang terjadi itu hanya kami.

Oleh karena itu untuk mengakhiri persoalan itu, kami sangat mengharapkan ada daerah otonom baru yang terbentuk apapun namanya, kami serahkan kepada Komisi II ataupun DPR dalam prosesnya. Supaya persoalan itu selesai.

Kemudian berkaitan dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Saya atas nama seluruh masyarakat suku besar Arfak yang membawahi Suku Mpur, Suku Miah dan Suku Karon di Lembah Kebar Snopi Ember Baken, Mumbrani dan Sidei. Kami minta pengembalian batas, tapal batas awal tanah adat moyang-moyang kami berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sorong, Kabupaten Induk dan Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Induk juga sebelum pemekaran.

Tapal batas ini kembali supaya luas wilayah Provinsi Papua Barat itu tidak berkurang. Apalagi kalau nanti terjadi pemekaran, pemekaran provinsi baru, itu yang kami minta. Itupun dalam waktu dekat itu harus ada keputusan atau ada surat ada catatan yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat di daerah itu.

Saya juga atas nama masyarakat minta perhatian dan dukungan dari Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Bapak Lambertus Jitmau terhadap permintaan yang saya sampaikan.

Tapal batas wilayah ini adalah pesan leluhur kami yang mengatakan bahwa pada masa muda kami, kami telah mengerakkan orang-orang Pur, Miah, dan Karon di lembah itu untuk membersihkan hutan dan menebang pohon dan menyiapkan lapangan terbang untuk tentara Amerika bawa obat-

obatan dan bahan makanan kepada kami di Lembah Kebar, itu sebuah nasehat atau titah dari orang tua kami untuk daerah ini.

Kami juga meminta kiranya Bapak, pada bab atau pasal dalam rancangan undang-undang ataupun keputusan lain tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang mengatur tentang tapal batas antar provinsi, antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, agar mencantumkan satu frasa yang mengatur tentang penyelesaian batas wilayah untuk diatur penyelesaiannya dengan peraturan atau keputusan Menteri Dalam Negeri atau keputusan apapun yang akan dihasilkan oleh rapat dewan nantinya.

Satu pepatah orang tua kami, "rumpun tebu yang sudah kami ikati, ikat ini agar kalian jaga supaya talinya tidak putus dan tebunya itu tidak berserakkan ke sembarang tempat", ini pepatah yang kami pegang sampai hari ini.

Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat di dataran Lembah Kebar, Snopi, Ember Baken dan Mumbrani Sidei kami minta, saya minta atas nama leluhur kita untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersaudara, dari hati ke hati secara musyawarah adat.

Itu yang kami sampaikan. Demikian penyampaian kami dan waktu selanjutnya saya mohon dari Ketua Komisi sebagai Pimpinan Rapat untuk memberikan waktu kepada Bupati Manokwari dan PJ Bupati Tambrauw untuk melengkapi apa yang kami sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Silakan.

**BUPATI MANOKWARI (HERMUS INDOU, PMH):**

Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disediakan bagi kami, saya Hermus Indou, PMH Bupati Manokwari.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Name Budaye,  
Salam kebajikan,  
Salam sehat dan,  
Selamat siang bagi kita semuanya,*

Mari kita *applause* dulu untuk kita sama-sama.  
Yang sangat kami hormati dan kasihi Pimpinan Komisi II dan juga semua, Anggota DPR RI Komisi II, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Polhukam,

Yang kami hormati Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga  
Pimpinan Komite I DPD RI juga,  
Yang saya hormati dan kasihi Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat  
Daya,  
Pejabat Bupati Kabupaten Tambrau dan juga,  
Bapak/Ibu hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu per satu,

Pertama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada  
Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi II yang memfasilitasi pertemuan ini  
untuk kami bisa menyampaikan secara langsung, apa yang menjadi aspirasi  
dari daerah. Tentu tidak lain adalah terkait dengan penyelesaian empat distrik  
yang telah dimekarkan menjadi sebelas distrik yang masuk menjadi cakupan  
wilayah Kabupaten Tambrau dan sebentar lagi Kabupaten Tambrau akan  
menjadi cakupan wilayah dari Provinsi Papua Barat Daya.

Bapak/Ibu semua yang saya hormati,

Atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten  
Manokwari, kami menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat  
Kabupaten Manokwari mengapresiasi dan juga mendukung sepenuhnya upaya  
pemerintah dan juga DPR RI untuk memekarkan Provinsi Papua Barat Daya  
dari Provinsi Papua Barat. Tentu tidak lain pemekaran ini bertujuan adalah  
untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua, tetapi juga untuk  
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mendorong  
pertumbuhan, pemerataan pertumbuhan antar wilayah di tanah Papua.

Yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah dan  
juga DPR RI juga diharapkan untuk secara arif dan bijaksana mencari solusi  
yang terbaik untuk penyelesaian empat distrik dan yang sudah dimekarkan  
menjadi sebelas distrik sekaligus mengembalikan batas wilayah Kabupaten  
Manokwari.

Tentu kami sampaikan untuk diketahui bahwa ketika Undang-Undang  
nomor, maaf Undang-Undang tentang Pembentukan Tambrau itu ditetapkan  
dan diuji di MK kemudian keluar Undang-Undang No.14 2014 itu hanya  
membatalkan Undang-Undang Pembentukan Tambraunya.

Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan  
Provinsi Irian Jaya dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Jaya itu tidak  
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya bahwa cakupan wilayah itu  
masih menjadi sah dari pemerintah Kabupaten Manokwari.

*Nah* karena itu solusi untuk penyelesaian batas wilayah dan juga  
pengembalian 4 (empat) atau 11 (sebelas) distrik ini ke Pemerintah Kabupaten  
Manokwari kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi II DPR RI untuk  
senantiasa mencari solusi yang terbaik untuk kabupaten dan kabupaten  
dan pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari, baik lewat  
pemekaran daerah otonom baru. Apakah dengan menggunakan nama Empur  
ataupun Manokwari Barat ataupun nama lain, kami prinsipnya mendukung.

Ataupun dalam waktu dekat setelah Provinsi Papua Barat Daya dimekarkan menjadi sebuah provinsi dan ada itikad baik dari pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan juga pejabat Bupati Tambrauw untuk segera menyelesaikan dan juga mengembalikan batas wilayah ini, tentu kami juga berterima kasih bahwasannya ini hal yang sangat-sangat baik. Artinya penyelesaian batas wilayah ini bisa diselesaikan sebelum pembentukan Provinsi, maaf pembentukan kabupaten baru di wilayah itu.

*Nah* ini juga kami sangat mengharapkan dukungan dan juga bantuan dari pemerintah dan juga DPR RI untuk senantiasa bisa menyelesaikan masalah keempat distrik ini dengan baik, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di wilayah Tambrauw dan juga di Kabupaten Manokwari.

Saya kira inti dari penyampaian kami cukup sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Saudara Bupati Manokwari.

Bupati Tambrauw ada yang mau disampaikan, cukup ya, oke baik, ada?

**BUPATI TAMBRAUW (ENGELBERTUS G. KOCU, S.HUT, M.M.):**

Iya saya tambahkan saja sedikit.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang terhormat Pak Dirjen Polpum dari Kemendagri,  
Pimpinan Komite I DPD RI,  
Kemenpan ya, BPN,  
Ketua DPRD Papua Barat,  
Ketua MRP Papua Barat,  
Bapak PJ Gubernur Papua Barat,  
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,  
Bapak Sekda Provinsi Papua Barat,  
Bapak Bupati Fak Fak,  
Bupati Manokwari dan semua, mungkin saya tidak menyebutkan namanya satu per satu,

Saya pikir tadi sudah disampaikan ya. Sudah cukup jelas dari Bapak Gubernur, kemudian Bapak Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, kemudian Bapak Sekda Provinsi yang sudah menguraikan cukup panjang. Bapak Bupati Manokwari.

Kemarin kita sudah ada pertemuan juga di Kemendagri dan hasil daripada kesimpulan itu adalah kita nanti melakukan musyawarah adat yang nanti didukung oleh, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang kemudian akan fasilitasi di kabupaten masing-

masing. Karena masalah ini memang masalah yang kita lihat masalah yang terjadi diantara dua keluarga sebenarnya tidak jauh. Ya tidak sama seperti di daerah Muari memang agak berbeda.

Oleh karena itu kami sebagai pemerintah Kabupaten Tambrauw siap mendukung apa yang telah disampaikan sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang ada.

Sekian dan terima kasih.

Tuhan memberkati kita.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Saudara Pejabat Bupati Tambrauw.

Bapak/Ibu,  
Pimpinan dan Komisi II DPR yang saya hormati,

Kita tadi sama-sama mendengarkan, tolong *mic*-nya dimatiin saja Pak.

Jadi, ada dua hal sekarang kita mulai yang, saya mau menyampaikan hal yang kita fokus dulu saja kepada Provinsi Papua Barat Daya ya. Tetapi saya sudah pernah beberapa kali dalam waktu itu disampaikan, saya mengulangi lagi. Supaya bisa disampaikan kepada teman-teman masyarakat di Tambrauw maupun di Manokwari, 4 (empat) dan 11 (sebelas) distrik itu.

Kemarin kami sudah pernah bahas di Komisi II, ya tentang langkah-langkah upaya kita bisa menyelesaikan, menyahuti aspirasi dari masyarakat di sana itu.

Yang pertama, dua penyelesaiannya. Pertama adalah melalui perubahan undang-undang, Undang-Undang Tambrauw dan perubahan Undang-Undang Manokwari tentang cakupan wilayah ya. Dan ini juga bisa jadi dua cara. Pertama memang dipindahkan begitu saja dibuat undang-undang. Atau kalau memang nanti ada waktunya seperti diusulkan masyarakat terbentuk kabupaten baru yang namanya Manokwari Barat, itu alternatif untuk penyelesaian dari penyesuaian perubahan undang-undang.

*Nah* yang kedua yang adalah yang paling mungkin dan memang bisa cepat itu kalau memang kesepakatan atau apa ada saja nanti bahan baru itu kita ajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi ya. Tentu ini akan menjadi komitmen kita bersama antara DPR dengan pemerintah bersama dengan pemerintah daerah.

*Nah*, untuk sampai ke sana, untuk sampai ke sana ya Bapak-bapak sekalian, kami minta secara tertulis ya, kesepakatan antara dua Bupati ya, Bupati Manokwari dengan Bupati Tambrauw yang tentu didukung oleh aspirasi dari 4 (empat) dan 11 (sebelas) distrik itu yang ingin pindah, ditambah juga

mungkin perlu dukungan dari masyarakat atau tokoh adat di sana, tertulis. *Nah*, sampaikan nanti pada Komisi II dan pemerintah ya.

Terus kemudian kami sudah sepakat waktu itu kita akan mengundang lagi, mengundang lagi untuk menerima itu, itu akan jadi catatan yang tanggal 21 kami akan rapat dengan Menteri Dalam Negeri. Di situ akan bicara tentang *design* besar penataan daerah juga batas wilayah ya.

*Nah* kemarin juga kalau tidak salah Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Dirjen Polpum pada saat ketemu dengan masyarakat Fak Fak dan Kaimana sudah menyampaikan usulan pemekaran provinsi baru di seluruh Indonesia termasuk Momorai Raya itu juga akan mulai kita bahas di tanggal 21 itu.

*Nah* jadi surat yang tadi disampaikan aspirasi itu akan nanti masuk menjadi salah satu kesimpulan di dalam Rapat Kerja dengan Mendagri iya. Itu sebagai komitmen bentuk dukungan dari Komisi II kepada masyarakat di Papua Barat, Papua Barat Daya termasuk khususnya di 4 (empat) distrik dan 11 (sebelas) distrik itu. *Nah*, jadi saya kira itu *exit way* sementara ini yang bisa kita tempuh ya.

Jadi sebetulnya itu tidak ada kaitan langsung dengan soal pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sama sekali beda. Cuma masyarakat di sana mengambil momentum, meminjam momentum pembahasan Papua Barat Daya ini, yang tidak bisa kita abaikan.

*Nah*, bentuk tidak pengabaian kami di Komisi II agenda yang mau kami lakukan adalah yang tadi seperti saya katakan itu. Jadi, tolong setelah ini Pak Bupati, Pak Bupati, Bupati Manokwari dan Bupati Tambrau tentu di bawah supervisi pejabat gubernur melakukan tadi surat kesepakatan segala macam itu sehingga itu menjadi dasar kami untuk bisa melangkah untuk menyelesaikan masalah ini.

Saya kira *clear* ya, saya kira urusan itu tidak usah kita tanggapin di Komisi II, kita tinggal jalani saja agenda surat masuk tanggal 21 kita bahas begitu ya.

*Nah* selanjutnya kembali ke topik utama kita, kembali ke laptop gitu soal Provinsi Papua Barat Daya kami persilakan kalau ada Pak Gaus, kemudian Pak Komar, Pak Richo sementara tiga.

Silakan Pak Gaus.

**F-PAN (GUSPARDI GAUS):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Bapak PJ Gubernur Papua Barat,

Pak Sekda,  
Dari semua tentu Pak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Bachtiar sebagai Irjen Hukum dan Politik, kemudian, Ketua Persiapan Pelaksanaan Provinsi Papua Barat Daya, Bapak-bapak Bupati yang sempat hadir, Ketua DPRD Papua Barat, Hadirin yang berbahagia,

Pertama menyikapi apa yang Bapak-bapak sampaikan kepada kami, saya mengarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua dan beliau juga sudah mengkonfirmasi kepada kami bahwa persoalan batas wilayah dan lain sebagainya itu, apa yang beliau sampaikan itu adalah komitmen kami untuk bagaimana menyelesaikannya. Jadi jelas alur, tahapan supaya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Barangkali saya sangat mengarisbawahi dan kawan-kawan Komisi II saya yakin ikut mengarisbawahi apa yang beliau sampaikan kepada kita bersama.

Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh PJ Gubernur, berkaitan terhadap Ibu, Ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Adalah *moment* yang tepat Pak PJ Gubernur menyampaikan aspirasi itu. Kebetulan sebetulnya pada hari ini kita akan Rapat Mini Fraksi yang akan memutuskan tahap pertama tentang RUU Papua Barat Daya. Tentu masukkan dan saran yang disampaikan seluruh elemen masyarakat pasti kami akan kami lakukan kajian, pendalaman. Tentu tidak hanya bersifat sektoral, tentu berbagai aspek yang melatarbelakangi mana yang lebih tepat kita dudukkan Papua Barat Daya Ibukotanya itu apa? Karena kami baru *enggak* sampai dua minggu yang lewat saya dengan kawan-kawan yang dipimpin oleh Ketua langsung untuk menjemput aspirasi. Luar biasa apresiasi dan sambutan dan harapan yang sudah dua puluh tahun penantian yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Komisi II bersama pemerintah akan menetapkan RUU yang mudah-mudahan menjadi keputusan.

Tadi saya lihat ada Ketua DPD, keluar ya? Maaf kalau tidak saya sapa karena *enggak* saya lihat orangnya.

Jadi, inilah yang perlu saya sikapi, saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Guspari Gaus saya selalu *concern* terhadap Papua. Kebetulan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 saya juga adalah anggota Pansusnya yang dipimpin ketika itu Ketua Pansusnya adalah Pak Komarudin.

Jadi, mudah-mudahan kesepakatan-kesepakatan apa yang akan diputuskan oleh Komisi II adalah merupakan harapan dan keinginan dari masyarakat Papua Barat Daya nantinya.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Komarudin.

**F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Rombongan dari Papua Barat,

Mohon maaf saya tidak sebut satu per satu.

Semua yang saya hormati termasuk fraksi di balkon,  
Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi II yang saya hormati,

Tadi saya ada rapat yang penting sekali, tetapi saya lihat masyarakat terlalu banyak dan saya kira suasananya begitu gawat. Ternyata dengan semangat kekeluargaan bisa diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Meskipun undang-undang ini adalah undang-undang yang diinisiasi atau hak inisiatif anggota DPR, yang tentu semua yang disampaikan itu menjadi masukan, keputusan tetap menjadi keputusan DPR karena itu hak inisiatif.

Ada hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam otonomi khusus, karena pemekaran kita ini pemekaran karena ada otonomi khususnya. Daerah lain di seluruh Indonesia setiap hari menuntut pemekaran tetapi karena tidak ada Otsus di sana makanya tidak bisa. Yang ada Otsuspun hanya Papua yang diberi kekhususan untuk memekarkan.

Oleh karena itu kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, yang Papua yang kemarin itu kita pikir masalah karena tiga provinsi, satu kali dimekarkan tetapi toh prosesnya begitu baik, cepat diselesaikan.

Papua Barat, saya dapat surat dari Bupati Kaimana dan Bupati Fak Fak juga yang isinya justru menolak untuk bergabung dengan Barat Daya. Ketika tadi Pak PJ sampaikan dari Fak Fak untuk bergabung. Bupati Fak Fak hati-hati jangan sampai tanda tangan surat terlalu banyak membuat Bapak sendiri yang rumit di dalam. Harus ada konsistensinya.

Saya ada punya dokumennya, dan dokumennya juga saya dapat dari tokoh-tokoh juga yang berpengaruh di sana, termasuk mantan Bupati Fak Fak Wahidin Puarada. Saya punya jaringan kuat di sana. Saya dari SMA juga di sana. Jadi, jadi jangan sampai Bapak terbawa oleh keinginan kelompok a, kelompok b, karena pemekaran ini Papua ini pertama harus diperhatikan

dengan sungguh-sungguh. Karena didalam Otsus itu disebut satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, itu menjadi dasar ya.

Oleh karena itu kenapa kita dari Timika pindahkan ke Paniaye, eh Nabire? Karena memperhatikan di mana orang Papua banyak di situ. Karena seluruh *Policy* Otsus itu diperuntukkan bagi orang asli Papua. Itu yang harus diingat.

Mau bicara ibukota, mau bicara apapun harus pegangannya di situ. Ini menguntungkan orang asli atau tidak ya. Saya kebetulan kemarin dipercayakan teman-teman dari DPR jadi Ketua Pansus, jadi itu saya *concern* sampai hari ini.

Oleh karena itu sebenarnya tadi tidak perlu ada tolak menolak bergabung atau tidak bergabung. Karena ada mekanisme untuk menentukan sebuah wilayah bergabung atau tidak bergabung. Itu DPR menggunakan untuk tiga provinsi di Papua.

Pendekatan pertama adalah wilayah adat. Kalau tidak wilayah adat, pendekatan kedua soal sejarah pemerintahannya. Dan permohonan maaf saya, mungkin saya salah Pak Hakim, ini dulu teman saya di DPR Papua, ini senior ini kalau salah boleh tegur saya. Yang saya pahami adalah wilayah Bumrai itu terdiri dari Fak Fak, Kaimana, Timika yang sudah masuk ke Papua sana, kemudian Manok apa, Wabentone dan Teluk Wandama yang saya mengerti begitu, itu pendekatan pertama. Tetapi kalau pendekatan ini tidak memenuhi, kita masuk ke pendekatan kedua benarkah Fak Fak, Kaimana itu pemekaran dari seseorang atau tidak? Juga tidak. Dari dua syarat itu tidak terpenuhi.

Kemudian dari segi mendekat rentang kendali, di situ ada wilayah Bintuni, Teluk Bintuni itu memisahkan dua provinsi ini jauh sekali dari Sorong. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya tidak memenuhi syarat itu.

Sebenarnya tadi lebih berdebat ke soal logika. Jangan soal saya suka Pak Bupati karena terbawa kelompok, ini mau bupati mau tanda tangan dukung, bupati tanda tangan menolak itu tidak. Sebenarnya tidak perlu tetapi harus dijelaskan ini kepada rakyat dan publik Papua, Papua Barat.

Dengan begitu meskipun nanti ini keputusan di fraksi-fraksi di Komisi II tetapi saya pikir masalah jelas. Apalagi tadi juga disampaikan teman-teman secara jelas. Jadi, kita tidak terlalu pusinglah, lebih mudah untuk.

Soal ibukota, saya kira tadi juga bisa dipakai pendekatan. Kalau ibukota kira-kira manfaat buat orang asli itu apa. Kalau di kabupaten manfaatnya apa, itu-itu yang jadi pegangan utama. Jangan asal wah ini taruh di sini, taruh di sini. Pokoknya seluruh *Policy* Otsus pertama harus mempertimbangkan kepentingan orang asli Papua.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Pak Komarudin, pakar ahli pakar Papua, sudah pakar ahli lagi.

Pak Rico.

**F-NASDEM (RICO SIA F):**

Siap, terima kasih Pimpinan. Terima kasih juga pada rekan-rekan semua yang hadir di sini.

Yang terhormat dan kami cintai Bapak PJ Gubernur,  
Ketua MRP,  
Kemendagri sebagai mitra Komisi II,  
Ketua Komite I,  
Ketua DPRD Provinsi Papua Barat,

Kalau yang Ketua Tim Pemekaran ini saya mau panggil apa ya, kakak yang terkasih juga, karena dia telephone biasa marah-marah saya, terima kasih kakak tertua. Terima kasih dan juga,

Pak Bupati Fak Fak,  
Pak Bupati Manokwari,  
Pak PJ Bupati Tambrauw,  
Sekda, kakak Sekda, karena sudah lama kenalnya juga,  
Kakak Ketua Fraksi Otsus dan  
Kakak Tambuna terima kasih,  
Yang sudah hadir sama-sama pada hari ini,

Memberikan pencerahan kepada kita semua juga kepada saya punya Om-om dari Kaimana, kak Fak Fak semua ada juga kakak-kakak, ade-ade semua yang dari Papua Barat Daya tentunya.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
*Shalom,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Tadi sudah dikupas tuntas oleh Ketua Pansus Otsus kita dan Pak Gaus sebagai anggota pada saat itu saya juga ada. Jadi saya tidak berpanjang lebar, tadi semua, kita sebenarnya sudah tahu, sudah sepakat bahwa baik Fak Fak maupun Kaimana saya masuk di mana saja yang penting saya harus jadi provinsi itu, itu mungkin kira-kira ya? Kakak PJ Gubernur.

Jadi, harapan saya juga Papua Barat Daya kalau boleh segera pandangan fraksi dan segera di Paripurnakan untuk kemudian tahun 2024 intinya harus segera ikut dalam pemilihan serentak.

Tanpa kita meninggalkan, tanpa kita meninggalkan Bomrai yang sudah memasukkan berkasnya, jadi mungkin kelengkapan-kelengkapan ini segera kita proses juga Pimpinan, karena di sana juga Bapak saya lahir di Fak Fak.

Terima kasih Pimpinan, itu saja.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
*Shalom,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Baik.

**KETUA KOMITE I DPD REPUBLIK INDONESIA (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):**

Pimpinan,

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Oh silakan Pak Filep.

**KETUA KOMITE I DPD REPUBLIK INDONESIA (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):**

Iya, baik terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk semua,  
Pimpinan yang saya hormati,  
Bapak/Ibu hadirin sekalian, saya tidak mengulangi satu per satu karena sudah cukup banyak yang terhormat, saya cukup langsung point,

Saya apresiasi sekali Pak Ketua Komisi II, momen inilah yang dari awal saya bersuara. Sehingga kita tidak menggunakan kekuasaan politik kita sewenang-wenang untuk memutuskan sesuatu tanpa mendengarkan aspirasi dari bawah.

Dan saya lihat momen ini menjadi referensi bagi kita menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara keseluruhan. Tidak hanya persoalan pemekaran tetapi seluruh persoalan itu beginilah cara yang beradab yang bisa terselesaikan, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, model beginilah yang seharusnya kita lakukan.

Sekali lagi saya sebagai Pimpinan Komite I DPR RI mengapresiasi Pimpinan Komisi II dan jajaran dalam agenda di hari ini.

Yang kedua, hampir jelas dalam penjelasan dan pembahasan daripada Bapak/Ibu, baik dari Plt gubernur maupun kita semua, sehingga mempermudah kita untuk mengambil kesimpulan pada pandangan pada rapat tingkat pertama. Dan saya dari DPD RI sangat mendukung itu dan mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi, sehingga Papua Barat Daya ini segera kita sahkan sebagai undang-undang.

Yang berikut suara dari Ketua DPR, Ketua MRP bahkan Pak Sekda Barat selaku tuan rumah yang memekarkan Papua Barat Daya. Ini kita juga harus perhatikan sehingga pemekaran itu kemudian tidak mengurangi hal-hal yang terkait kekuasaan wilayah masing-masing.

Karena wilayah administrasi pemerintahan sejenak kita berpikir di tingkat pusat mungkin mudah-mudahan saja Pak Ketua, tetapi kalau kita bicara tentang hak kepemilikan tanah, ulayat maka tidak sama prosesnya.

Oleh sebab itu saya sepatutnya sekali bahwa Bupati Manokwari, Bupati Tambrauw dan juga Plt TPJS, PJ Gubernur Papua Barat bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk segera tuntaskan persoalan batas wilayah Manokwari dan Tambrauw. Sehingga pembentukkan atau pengesahan undang-undang ini tidak lagi karak keter itu pusing dengan batas-batas wilayah, karena hari ini dibutuhkan adalah percepatan pembangunan. Oleh karena itu saya berharap secepatnya kita selesaikan masalah ini.

Saya pikir itu, sekali lagi, lebih cepat lebih bagus pembentukkan Papua Barat Daya yang disahkan, karak keternya ditetapkan. Pemilu 2024 Papua Barat Daya juga ikut pemilu, yang di Dapil Papua Barat silakan berjuang. Papua Barat kita berjuang. Intinya kuota aspirasi dari Papua, kursi diparlemen semakin banyak. Dan disitulah orang Papua, rakyat Papua bisa berjuang dengan saudara-saudara di seluruh tanah air. Saya pikir demikian.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Baik, terima kasih Pak Filep.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya kira dengan semua sudah menyampaikan pandangannya dan kita sudah *clear* mendengarkan aspirasi yang sudah disampaikan, saya kira cukup pertemuan kita. Kita setelah ini akan lanjutkan lagi Rapat Panja ya. Kami minta Bapak-bapak dan Ibu-ibu Komisi II juga wakil pemerintah DPD RI tetap di tempat. Jadi setelah kita tutup Rapat Dengar Pendapat ini kita dengarkan, apa kita lanjutnya Pasal Panja untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian pada sore hari ini ya.

Oleh karena itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Papua Barat dan yang akan jadi Papua Barat Daya ya.

Saudara pejabat Gubernur Papua Barat terima kasih. Ketua MRP Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, kemudian Ketua Panja, Pak Sekda Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, pejabat Bupati Tambrauw, Bupati Fak Fak, semua Bapak-bapak Raja, Ketua Adat, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak-bapak, Kakak-kakak yang hadir di sini semua terima kasih banyak ya, ini tanda kita semua bersatu.

Silakan-silakan, kalau ada lagi dokumen masuk lagi semua sini sebelum saya tutup, Fak Fak juga ada? Oh, iya silakan-silakan, pernyataan, oh iya silakan.

**PERWAKILAN DAERAH PAPUA:**

Tadi sudah disampaikan bahwa Bomba Raya itu akan dibahas tanggal 21 di *design* besar penataan daerah.

Izin di forum yang terhormat ini, dihadapan seluruh Komisi II, kami minta untuk hak inisiatif Komisi II, bukan hanya masuk dalam pembahasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Iya, jadi begini Pak. Besok tanggal 21 itu kita akan mulai pembahasan tentang *design* besar penataan daerah, termasuk daerah-daerah pemekaran baru. *Nah*, jadi aspirasi ini akan kami sampaikan dan nanti akan kami bahas pada, kalau memang cepat ini kakak, Komisi II ini urusnya sederhana saja ya. Masuk barang sini, bisa cepat, bungkus begitu. Asal ada komitmen kita semua bersama termasuk pemerintah, jadi *enggak* repot begitu.

Terima kasih.

**BUPATI FAK FAK:**

Izin Pimpinan.

*Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Yang saya hormati Bapak-bapak unsur Pimpinan Komisi II,  
Bapak/Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan,

Izinkan saya Bupati Fak Fak akan menyampaikan pernyataan sikap dari masyarakat adat kami wilayah adat Bumrai. Pertama bahwa masyarakat adat wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus di tanah Papua sesuai Undang-Undang No. 2 2021.

Kedua, bahwa masyarakat adat Bumrai di Fak Fak mendukung pemekaran Provinsi Otonomi baru berdasarkan 7 (tujuh) wilayah adat di tanah Papua, khususnya wilayah adat Bumrai menjadi salah satu provinsi yaitu Provinsi Bumrai Raya.

Yang ketiga, bahwa masyarakat adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak mendukung sepenuhnya upaya asosiasi para bupati, Bupati Fak Fak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Bentuni dan Bupati Teluk Pondama. Dan masyarakat wilayah adat Bumrai dalam pembentukan daerah otonomi baru sebagai Provinsi Bumrai Raya di wilayah adat Bumrai di tanah Papua.

Empat, bahwa masyarakat Fak Fak wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak meminta kepada pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Bumrai Raya di wilayah Bumrai atas dasar pertimbangan kesamaan sejarah, filosofi, ikatan emosional dan sosiologi sebagai daerah otonomi baru Provinsi Bumrai Raya.

Kelima, memperhatikan semangat perjuangan putra-putri asli di wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak dalam memperjuangkan sejarah integrasi Irian Barat ke dalam wilayah NKRI, yang erat kaitannya dengan sejarah nasional Indonesia, maka masyarakat Fak Fak di wilayah adat Bumrai meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar segera membentuk daerah otonomi baru Provinsi Bumrai Raya.

Yang keenam bahwa masyarakat adat di wilayah adat Bumrai di Kabupaten Fak Fak meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia kiranya berkenan menyetujui usulan daerah otonomi baru Provinsi Bumrai Raya, Kabupaten Kokas dan juga Kota Madya Fak Fak.

Ini yang bisa kami sampaikan sekaligus kami akan menyerahkan dokumen usulan ini kepada Bapak Ketua Pimpinan. Dan selanjutnya kaitan dengan tadi beberapa hal yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak DPR Republik Indonesia, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):**

Terima kasih Saudara Bupati Fak Fak.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira semua tidak ada yang kita tidak tampung aspirasinya ya semua kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang sempurna nanti pada akhirnya proses penetapan Provinsi Papua Barat Daya ini.

Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil'alamin* maka Rapat Dengar Pendapat Komisi II hari ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.24 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,**

*a.n. hi.*

**Mahmud, S.E.  
NIP.196508021988031002**